

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari analisis data kuisioner sistem pengendalian intern dapat diketahui bahwa secara umum kondisi lingkungan pengendalian di pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung berada pada kriteria cukup. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kelemahan dan sangat diperlukan perbaikan guna mendukung terlaksananya SPIP yang baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
2. Sub unsur yang paling berpengaruh dalam membangun lingkungan pengendalian yang kondusif pada pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung adalah sub unsur penegakan integritas dan nilai etika serta kepemimpinan yang kondusif.
3. Terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung dalam penyelenggaraan SPIP seperti adanya keterbatasan biaya dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi SPIP kepada semua pegawai dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung, adanya keterbatasan biaya dalam pelaksanaan SPIP, sumber daya manusia, serta waktu dalam melakukan pemetaan SPIP dan kegiatan penilaian resiko

sehingga pemetaan SPIP dan penilaian resiko yang telah dilaksanakan hanya dilakukan terhadap beberapa SKPD terpilih.

4. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung dalam hal ini Kepala Daerah adalah memastikan adanya komitmen pimpinan (Kepala Daerah) dalam menerapkan keseluruhan sub unsur lingkungan pengendalian, menyelenggarakan pola mutasi pegawai yang sehat dan transparan, peningkatan SDM pegawai melalui pendidikan dan pelatihan berkesinambungan, membentuk tim SPIP di masing-masing SKPD, serta mengoptimalkan peran inspektorat dalam memonitoring dan melakukan evaluasi terhadap penerapan SPIP di pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

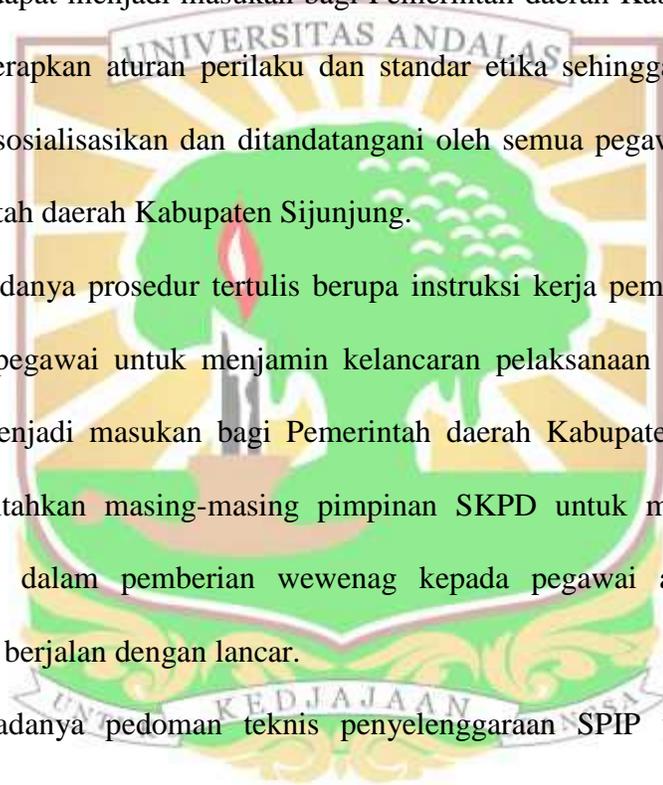
5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui masih terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung yaitu sebagai berikut :

1. Belum adanya aturan perilaku/ standar etika pegawai yang mengatur aturan berperilaku bagi pegawai di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung. Hal ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung untuk membuat aturan perilaku/ standar etika bagi pegawai untuk mengatur perilaku pegawai di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung sehingga dengan adanya aturan perilaku dan standar etika ini dapat

menghindari terjadinya pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung.

2. Karena belum adanya aturan perilaku dan standar etika di Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung maka belum adanya penandatanganan pakta integritas oleh semua pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung. Hal ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung agar diterapkan aturan perilaku dan standar etika sehingga pakta integritas dapat disosialisasikan dan ditandatangani oleh semua pegawai di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung.
3. Belum adanya prosedur tertulis berupa instruksi kerja pemberian wewenang kepada pegawai untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung agar memerintahkan masing-masing pimpinan SKPD untuk membuat instruksi tertulis dalam pemberian wewenang kepada pegawai agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar.
4. Belum adanya pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang dibuat dan disusun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah Kabupaten Sijunjung. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung untuk membuat pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dan tidak hanya berpedoman pada pedoman teknis yang dibuat oleh BPKP.



5. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung dalam penerapan SPIP harus segera diatasi terutama dengan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi SPIP secara bertahap kepada semua pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu :

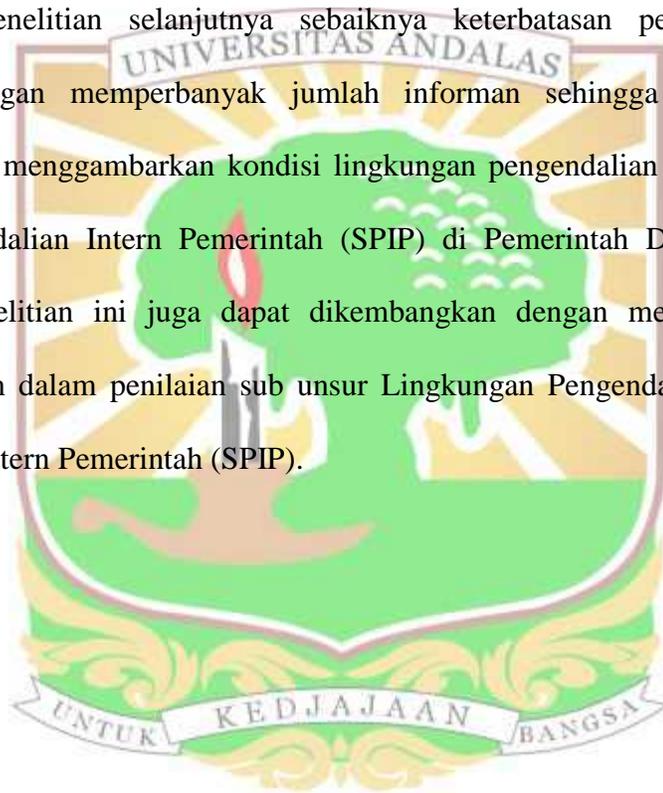
1. Informan/narasumber yang mengisi daftar uji dalam penelitian ini masih terbatas pada beberapa orang pejabat eselon III dan IV berasal dari beberapa dinas/badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sehingga belum mewakili seluruh pegawai dan SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
2. Tidak semua unsur-unsur SPIP yang diuji dalam penelitian ini , penelitian ini hanya melakukan pengujian terhadap unsur Lingkungan Pengendalian dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Instansi Pemerintah.

5.4 Saran

Pada penelitian ini penulis menyarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung benar-benar melaksanakan Pengendalian Intern yang pada penerapannya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk itu diperlukan Komitmen yang tegas dari Kepala Daerah selaku pucuk pimpinan dengan dukungan dan juga komitmen sepakat oleh seluruh jajaran pejabat beserta staf pada Pemda Kabupaten Sijunjung. hal ini juga terkait dengan penyediaan anggaran untuk peningkatan sumberdaya manusia seluruh pegawai khususnya dalam hal pemahaman terhadap SPIP.

Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya keterbatasan penelitian di atas dilengkapi dengan memperbanyak jumlah informan sehingga informasi yang diperoleh lebih menggambarkan kondisi lingkungan pengendalian dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan menggunakan skala pengukuran lain dalam penilaian sub unsur Lingkungan Pengendalian pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).



DAFTAR PUSTAKA

- Aren, Alvin A. Randal J, Beasley, dan Mark S (2008) : *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi kedua belas. PT. Indeks IKAPI. Jakarta.
- Aldag, R. Dan Stearns, T (1992) : *Management. 2nd Ed.* International Thomson Publishing.
- Bisri, Hasan (2013) : *Membangun sistem pengendalian intern yang efektif. Warta Pengawasan* Vol XX Nomor 3.
- Bastian, Indra (2006) : *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- BPK-RI (2015) : *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Tahun 2014*.
- BPKP. (2009) : *Modul Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Jilid 1-6*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2012) : *Internal Control over External Financial Reporting; A Compendium of Approaches and Examples*. Internal Control - Integrated Framework.
- Cohen J. Krishnamoorthy G. Wright A (2000) : *Corporate Governance and the Audit Process*. Midyear Auditing Conference. LA.
- Guy, et al (2002) : *Auditing Jilid 1*. 5th Edition. Erlangga. Jakarta.
- Holmes, Arthur W & David A, Burn (1990) : *Auditing Norma dan Prosedur Jilid I Edisi kesembilan*. Erlangga. Jakarta.
- H. Simanjuntak, Binsar (2012) : *Implementasi SPIP menuju layanan prima. Warta Pengawasan*. Vol XIX/No 3.

Harto, Puji dan Sukmaningrum, Tantriani (2011) : *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*, SNA XV Banjarmasin.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) : *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta. Salemba Empat.

Kurniawan, Ardeno (2012) *Audit Internal : Nilai tambah bagi organisasi*. BPPE. Yogyakarta.

Mulyadi (2001) : *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.

Mulyadi (2009) : *Auditing, Edisi 6*. Salemba Empat. Jakarta.

Modul Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2013). Pusdiklatwas BPKP.

Mulyani, Pujianik dan F.Suryawati, Rindah (2009) : “*Analisis Peran dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP/PP No 60 Tahun 2008) dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan Akuntansi Pemerintah Daerah*”. Universitas Trunojoyo. Madura.

Mardiasmo (2010) : *Opini WTP adalah Basic Requirement untuk Wujudkan Good Public Governance*. *Warta Pengawasan*. Vol XVII/No 3.

Pingkan Lonto, Miryam (2011) : *Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kota Bitung : Faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap Good Governance*. Tesis. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Rahmi (2014) : *Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kopertis Wilayah X*. Tesis. Universitas Andalas. Padang

Rittenberg, LE. dan Schwieger, BJ (2005) : *Auditing - Concepts for a Changing Environment*. Masson South - Western. Thomson Corporation.

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta.

Susanti, Nora (2013) : *Analisis Konfirmatori Faktor Pertimbangan Opini Wajar dengan Pengecualian, Tidak Memberikan Pendapat, dan Tidak Wajar Auditor BPK terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009*. Tesis. Universitas Andalas. Padang.

Sanyoto, Rahmat (2006) : *Analisis Kondisi Lingkungan Pengendalian dalam Sistem Pengendalian Intern Bank BTN*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

Sihotang, Hardi (2005) : *Evaluasi Control Environment dalam Sistem Pengendalian Intern PT Bank Tabungan Negara (Persero)*. Makalah SESPIBANK XL. LPPI. Jakarta.

Sekaran, Uma (2006) : *Research Methods for Business*. 4th Ed, Jhon Wiley & Sons Inc. New York.

Sunarto (2003) : *Auditing*. Panduan. Yogyakarta.

Sukmadinata, Nana Syaodih (2007) : *Metode Pendidikan Penelitian*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Sugiyanto (2013) : *Pengaruh Kualitas Lingkungan Pengendalian (Control Environment) Terhadap Keandalan Struktur Pengendalian Intern*. Tesis. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Thomas G Noland, dan Matrejean, Eddie (2013) The Importance of the Control Environment :Expense Account Fraud At Blue Grass Airport. *Journal of Business & Economic Research*, Vol 11 No 2.

Wibisono, (2010) : *Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara melalui Penerapan SPIP*. Warta Pengawasan Volume XVII Nomor 2 Juni 2010. BPKP.

Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-On-Wing (2000) : *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.

Zumriyatun Laila (2010) : “*Analisis Penyelenggaraan PP No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dua Pemda di Sumatera Barat*”. Tesis. Universitas Andalas. Padang.

www.bpkp.go.id

www.coso.org

